

**SIKAP PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN BAHAN PUSTAKA
DI INDONESIA**

**Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan
di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang**

Oleh : Drs. Hari Santoso, S.Sos.



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JUNI 2005**

SIKAP PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN BAHAN PUSTAKA DI INDONESIA

Lihat buku “MENGUBUR PERADABAN HALAMAN 107
Media pustakawan Hal. 28

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mengakibatkan terjadinya ledakan informasi dalam berbagai bentuknya, sehingga tidak mungkin bagi lembaga yang bergerak dalam penyediaan informasi, termasuk perpustakaan akan dapat menghimpun, menyimpan, mengolah dan menyebarkan secara mandiri. Dalam hal ini perpustakaan dituntut untuk dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemakainya. Oleh karena itu dalam pembinaan koleksi harus dirancang dengan cermat dan matang sehingga tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dapat terwujud.

Pada dasarnya informasi apapun wujudnya harus disebarluaskan kepada masyarakat pemakai agar memiliki nilai guna. Namun seringkali penyebaran informasi banyak menghadapi gangguan dengan adanya sensor, penarikan kembali buku atau majalah dari peredaran dan yang paling menyedihkan adalah pembakaran (Sulistyo-Basuki, 1991:113-116). Untuk itu agar bahan pustaka tetap dapat diakses oleh pemakai tanpa adanya kekhawatiran akan timbulnya keresahan, perpustakaan perlu melaksanakan filterisasi atau penyaringan terhadap kandungan isi sumber informasi melalui kegiatan sensor dengan terus mempertimbangkan kebutuhan pemakai, nilai keterpakaiannya, sumber informasi dan mengacu pada prinsip-prinsip sensor dan penarikan dari peredaran terhadap buku-buku terlarang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bengue (1975:72-28) bahwa untuk menghindari adanya keresahan dan sekaligus merupakan kontrol sosial, maka sensor terhadap informasi perlu dilakukan.

Pemilihan dan Pengadaan Koleksi bahan Pustaka

Dalam dunia perpustakaan ada adagium yang mengatakan bahwa tidak ada satupun perpustakaan di dunia ini yang mampu swasembada informasi. Ini berarti sebuah perpustakaan membutuhkan perpustakaan atau pusat informasi lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemakainya.

Untuk menciptakan koleksi perpustakaan perguruan tinggi yang lengkap, kuat, bermutu dan berdaya guna dan berhasil guna, tidak terlepas dari falsafah seleksi yang dianutnya. Berangkat dari falsafah seleksi inilah para pustakawan akan mengadakan perencanaan pembinaan koleksi, pengorganisasian alat bantu seleksi literatur, penentuan kebijakan pengadaan literatur, pelaksanaan pengadaan, pengawasan dan evaluasi kemanfaatan sumber informasi bagi sivitas akademika. Menurut Trimo sebagaimana dikutip Suryana (1994:30-32) falsafah seleksi bahan pustaka ada tiga kategori, yaitu :

1. Faham Idealisme

Faham ini biasanya tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang telah maju jalan berpikirnya, dengan latar belakang yang mewarnainya antara lain

- a. Strata pendidikan pengguna jasa perpustakaan begitu tinggi
- b. Keadaan ekonomi masyarakatnya lebih kuat, sehingga buku merupakan bagian utama dari kehidupannya
- c. Sarana dan prasarana perpustakaan telah berkembang baik, dengan anggaran yang cukup kuat
- d. Pengguna jasa perpustakaan telah memiliki *reading habits* yang tinggi dan selalu mencari koleksi mutakhir
- e. Perpustakaan telah mampu mengakses informasi jarak jauh ke pangkalan data, baik langsung ke *producer/provider*, atau melalui *Gateway* yang ada
- f. Bahasa asing tidak menjadi kendala bagi pembacanya.

Faham idealisme mendorong terciptanya masyarakat ilmiah dan maju, dimana buku-buku yang berkualitas yang menjadi pilihannya dengan tujuan akhir terciptanya koleksi yang lengkap, kuat, tepat dan berkualitas tinggi (*needs, demand, taste*)

2. Faham Realisme

Faham ini biasanya tumbuh pada masyarakat yang tingkat pendidikannya belum maju, dimana minat baca masih belum berkembang. Buku dan bahan bacaan lainnya belum menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka perlu bacaan hanya pada saat itu saja, karena memang nyata-nyata dituntut untuk itu. Literatur lainnya tidak dihiraukannya. Kelompok ini tidak memerlukan bacaan pendukung untuk memperluas wawasan dan kepentingan masa depan, hanya untuk saat itu saja.

Latar belakang lahirnya faham ini, antara lain :

- a. Perpustakaan belum lama berdiri dan belum memiliki tenaga ahli perpustakaan
- b. Tingkat pendidikan masyarakat sekitarnya belum maju
- c. Belum berkembangnya minat baca masyarakat pengguna jasa perpustakaan
- d. Belum memahami makna dan tujuan didirikannya perpustakaan di lingkungannya
- e. Terbatasnya anggaran dan alat bantu seleksi yang dimiliki perpustakaan
- f. Kebanyakan metode mengajar para pendidiknya masih bergantung kepada buku-buku teks wajib, dan belum banyak bervariasi kepada buku-buku anjuran atau buku-buku rujukan yang lebih mendalam
- g. Terbatasnya ketersediaan buku-buku dan literatur lainnya yang berkualitas di pasaran

Adapun tujuan sementara faham realisme adalah terbinanya koleksi yang sesuai dengan realita tuntutan pemakainya (tahap permulaan)

3. Faham Kompromisme

Faham ini biasanya terdapat pada masyarakat dan perpustakaan yang baru berkembang (belum tinggal landas). Kelompok ini berpandangan dari dua sudut pemikiran yaitu pengadaan koleksi untuk memenuhi tujuan perpustakaan dan kebutuhan pemakai mendapat perhatian yang sama. Secara realitas kebutuhan

masyarakat pembaca diperhatikan dan secara idealis tujuan perpustakaan harus tercapai, bersamaan dengan meningkatnya minat baca para pengguna informasi.

Latar belakang timbulnya faham kompromisme, antara lain :

- a. Perpustakaan tumbuh dan dibangun pada masyarakat yang sedang berkembang
- b. Literatur bahasa asing masih menjadi kendala untuk sebagian pengguna perpustakaan, dan terbitan buku-buku berbahasa Indonesia masih terbatas di pasaran
- c. Corak berpikir masyarakatnya masih dalam transisi, dari cara berpikir realisme menuju pola berpikir idealisme sehingga kadang-kadang buku masih merupakan barang lux
- d. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pengadaan koleksi
- e. Adanya keterikatan teknis administratif dalam penggunaan anggaran di atas jumlah tertentu
- f. Terbatasnya alat bibliografis pengadaan pustaka yang memuat abstraks dan notasi dari pustaka yang diterbitkan oleh penerbit

Bertitik tolak dari latar belakang di atas faham kompromisme mengambil jalan pintas mengkombinasikan faham realisme dengan idealisme. Dimana kebutuhan, tuntutan pemakai dan misi perguruan tinggi dilaksanakan secara serempak dengan tujuan sasaran terwujudnya koleksi yang mendekati ketepatan pembacanya.

Dalam pemilihan dan pengadaan bahan pustaka, **Suyatni (1994:92-96)** mengemukakan bahwa pada beberapa perpustakaan perguruan tinggi, banyak dijumpai beberapa kelemahan dalam pengembangan koleksi, diantaranya :

- a. Pemilihan belum berjalan dengan baik, kadang dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang relevan dengan program yang ada
- b. Informasi mengenai terbitan-terbitan terbaru kurang dikenal oleh sivitas akademika
- c. Perpustakaan (pustakawan) tidak diikutsertakan di dalam menentukan pengembangan dan kegiatan pengadaan koleksi
- d. Dana yang terbatas dan tidak berkesinambungan sehingga judul-judul terbaru akan tertunda pengadaannya atau ditiadakan
- e. Harga buku dsan jurnal yang relatif mahal, terutama untuk terbitan luar negeri
- f. Prosedur pengadaan/pembelian yang belum mendukung, Sering prosedur pembelian memakan waktu cukup lama sehingga buku-buku yang diterima sudah tertinggal informasinya atau habis persediaannya.

Oleh sebab itu sebelum melakukan pemilihan, seorang pustakawan hendaknya mempertimbangkan tiga hal, yaitu fungsi perpustakaan, ruang lingkup bidang yang akan dicakup dan masyarakat yang dilayani.

Dalam pemilihan bahan pustaka terdapat kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. Judul disesuaikan dengan program pendidikan yang ada

2. Judul disesuaikan dengan tingkatan pemakai
3. Pengarang sudah sangat dikenal dalam bidangnya
4. Isi buku harus berbobot, tahan lama dan tidak cepat berubah
5. Penerbit cukup dikenal pada bidangnya
6. Buku tercantum dalam katalog penerbit dan masih ada di pasaran
7. Tahun dan edisi terbaru
8. Harga buku cukup pantas

Mengingat bahwa perguruan tinggi berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional, maka dalam pemilihan terdapat juga kriteria umum yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Tidak membahayakan HANKAMNAS
3. Tidak dilarang pemerintah cq Kejaksaan Agung
4. Tidak berasal dari penerbit yang dilarang
5. Sesuai dengan ketentuan Departemen Pendidikan Nasional
6. Menunjang pendidikan nasional

Pemilihan bahan pustaka di perpustakaan perguruan tinggi dapat dilakukan oleh semua anggota sivitas akademika, yaitu dosen, peneliti, mahasiswa, administrator dan pustakawan. Keputusan terakhir apakah hasil pemilihan akan diadakan atau tidak, ada pada pustakawan karena pustakawan lebih mengetahui keadaan koleksi, prioritas pengadaan agar koleksi berimbang dan anggaran yang tersedia. Sedangkan mekanisme dalam pengembangan koleksi seharusnya dituangkan dalam bentuk kepanitiaan yang terdiri dari kelompok pustakawan, dosen dan para administrator di perguruan tinggi. Fungsinya adalah sebagai penanggungjawab terhadap pengembangan koleksi secara keseluruhan.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemilihan bahan pustaka, pustakawan dituntut memiliki persyaratan, yaitu :

1. Memahami kebijakan pengembangan koleksi
2. Dapat bekerjasama dengan pustakawan lain, dosen, mahasiswa, para administrator/pengambil keputusan dan lembaga lain yang berkaitan seperti penerbit, toko buku ataupun jobber
3. Memahami program pendidikan yang sedang dilaksanakan dan kecenderungan perkembangan di perguruan tinggi
4. Dapat menggunakan sarana seleksi yang tersedia
5. Dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, CD-ROM, faksimil, dan sejenisnya
6. Memahami dan mengikuti berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembelian buku, perbukuan dan keuangan

Kriteria-kriteria tersebut di atas dimaksudkan agar dalam penyebaran informasi dapat tepat sasaran dan tidak mendapat halangan dalam bentuk apapun sehingga informasi yang disebarkan benar-benar memiliki nilai guna bagi pemakainya. Apapun keadaanya semua

bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pemakainya secara optimal. Fungsi penyaringan informasi hendaknya bukan hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pemakai jasa perpustakaan. Hal ini didasarkan bahwa sifat dari informasi adalah bebas nilai sedangkan pemberian makna atau nilai dari informasi menjadi kewenangan pemakai informasi.

PELAKSANAAN CENSORED BOOKS & BANNED BOOKS DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Dalam hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, **Asrukin (1992:14)** menyebutkan bahwa tindakan penyensoran harus dilakukan terutama yang menyangkut hal-hal berikut, yaitu :

1. Kesalahan penulisan Al-Qur'an

Kesalahan ini pernah terjadi pada tahun 1978 ketika sebuah Al-Qur'an ukuran 12,5 cm x 17,5 cm dipalsukan dan memakai inisial penerbit Menara Kudus

2. Kesalahan penafsiran ajaran Islam

Kesalahan penafsiran ajaran Islam dapat dilihat pada kasus Ahmadiyah, dimana ada usaha menonjolkan diri secara berlebihan karena menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Ini menyimpang dari ajaran Islam bahwa " Sesungguhnya Muhammad itu adalah bapak dari anak-anaknya dan juga dia adalah Rasulullah dan nabi yang terakhir dan sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui atas segala sesuatu " (Al-Qur'an,33:40)

3. Penghinaan

Islam sangat menghormati hak-hak seseorang, sehingga tidak diperkenankan antara sesama umat manusia maupun antara suatu golongan dengan golongan yang lain. Allah berfirman dalam surat A-Hujurat " Wahai sekalian orang yang beriman, janganlah segolongan kaum dari kamu menghina segolongan kaum yang lain, barangkali mereka itu lebih baik dari kamu, dan janganlah segolongan perempuan dari kamu menghina segolongan perempuan yang lain, barangkali mereka juga lebih baik dari kalian (Al-Qur'an 49:11). Pelarangan buku *The Satanic Verses* adalah contoh dari unsur penghinaan terhadap keluarga nabi. Demikian juga yang terjadi dengan pelarangan buku serat Darmogandul dan Suluk Gatoloco yang dianggap telah menghina syari'at dan umat Islam

4. Pemuatan gambar Nabi Muhammad

Masalah gambar dalam hukum Islam adalah masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat. Sebagian Ulama terutama yang tergolong dalam kelompok Ulama Salaf mengharamkan pembuatan gambar terhadap benda hidup, sebab hal ini dipandang sebagai usaha untuk menyamai sifat Allah (Asy-Syaukani, 1973:98). Namun untuk pemuatan gambar Nabi Muhammad semua Ulama baik yang salaf maupun yang khalaf jelas sepakat mengharamkannya. Keputusan untuk menarik buku *The Art of Islam* adalah didasarkan atas pemuatan gambar Nabi Muhammad.

5. Agitasi

Agitasi atau adu domba, yang dalam istilah Arabnya dikenal dengan naminah, adalah sangat tercela dan ini merupakan sifat atau tanda-tanda kemunafikan. Contoh dalam kasus ini adalah buku karya Ashaari Muhammad yang berjudul Perang Teluk yang diterbitkan oleh Yayasan Darul-Arqom. Buku ini telah ditarik dari peredaran karena gaya dan isi tulisannya yang bersifat agitatif.

SIKAP PUSTAKAWAN DALAM SENSOR

Persoalan sensor merupakan masalah yang dilematis dimana pada satu sisi informasi harus disebarkan kepada masyarakat pemakai, namun pada sisi yang lain penyebaran informasi tanpa filterisasi dapat mengakibatkan keresahan dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu harus ada batas yang jelas pada batas yang mana sebuah sumber informasi harus disensor, agar nilai keterpakaian sumber informasi tetap terjaga. Dalam hal ini pustakawan memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan sensor terhadap sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Dalam hal sensor pustakawan dapat bersikap menerima keputusan sensor yang dikeluarkan pihak Kejaksaan atau bersikap lain (**Benge, 1973:83**).

Sedangkan **Asrukin (1992:15)** secara rinci mengemukakan 4 (empat) sikap yang dapat dilaksanakan oleh pustakawan berkaitan dengan sensor, yaitu :

1. Menerima secara mutlak segala keputusan lembaga yang melakukan sensor

Ini berarti bahwa semua buku yang dinyatakan terkena sensor ditarik dari rak dan kartu katalognya dicabut. Selanjutnya buku tersebut bisa diserahkan kepada pihak yang berwajib atau disimpan di tempat khusus dan selanjutnya buku ini tidak boleh dibaca oleh siapapun

Keputusan ini sangat bertentangan dengan prinsip penyebaran informasi terutama dalam kaitannya dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang merupakan tugas utama dari perpustakaan.

2. Menerima keputusan sensor tidak dengan mutlak

Artinya bahan pustaka ditarik dari rak namun kartu katalognya tidak dicabut. Pada kartu katalog diberi tanda bahwa buku disensor, dan bagi pemakai boleh membaca dengan ijin khusus dari pustakawan yang berhak. Ijin ini diberikan atas dasar kematangan calon pembaca dan keperluannya dalam kaitannya dengan bahan pustaka yang terlarang tersebut. Bahan pustaka hanya boleh dibaca di tempat khusus yang telah disediakan.

Sikap ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sikap yang pertama, sebab masih memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan melalui orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus dan sekaligus menyaring informasi dari buku atau karya tersebut serta membuatnya tetap bermanfaat

3. Menolak keputusan sensor

Penolakan terhadap keputusan sensor tersebut didasarkan atas pertimbangan kepentingan atau meninjaunya dari segi keilmuan dan kekhususan yang ada pada program pendidikan serta hubungannya dengan bahan pustaka tersebut. Misalnya

buku yang bergambar porno masih bisa disajikan untuk keperluan seni lukis atau untuk keperluan jurusan seni dan kerajinan.

4. Pustakawan melakukan sensor sendiri terhadap bahan pustaka yang dipandang harus disensor, berdasarkan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Contohnya terhadap buku *Libraries and Culture Change* oleh Ronald C. Benge yang menulis bahwa Kholifah Umar pernah menghancurkan Perpustakaan Alexandria (**Benge, 1973:74**). Jika hal ini dipandang dapat merugikan umat Islam, maka buku tersebut dapat dinyatakan terlarang beredar untuk umum dan tidak dikeluarkan. Mengingat bahwa Umar tidak pernah melakukannya sehingga hanya bersifat tuduhan yang merugikan (Syoub, 1979:226)

ALASAN PORNOGRAFI DLLL.....

menyebutkan Alasan yang berkaitan dengan agama kesalahan penulisan dan penafsiran ayat-ayat kitab suci, penghinaan, pemuatan gambar Nabi Muhammad (bagi agama Islam)

DAFTAR PUSTAKA

- Asrukin, Mochammad. 1992. *Dasar-Dasar Sensor : Tinjauan Ajaran Hukum Islam*.
Majalah Berita & Ilmu Perpustakaan & Informasi No.3 Vol.I Maret 1992. Jakarta
: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- Benge, Ronald C. .1975. *Libraries and Cultural Change*. London : Clive Bingley
- Sulistyo-Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Pustaka Gramedia
- Syoub, Joesoef. 1979. *Sejarah daulat Khulafaur-Rosyidin*. Jakarta : Bulan Bintang

**PERAN SENSOR DALAM PEMBINAAN KOLEKSI
DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI**

Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan
Di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang

Oleh :
Drs. Hari Santoso, S.Sos.



**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JUNI 2005**